

POLITISASI HIJAB PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG

Nurul Azizah

Universitas Ibrahimy Situbondo email: nurulazizah@ibrahimiy.ac.id

Mohammad Armoyu

Universitas Ibrahimy Situbondo email: marmoyu@ibrahimiy.ac.id

<i>Diterima: 23 Juni 2019</i>	<i>Direvisi : 7 Desember 2019</i>	<i>Diterbitkan: 25 Desember 2019</i>
-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

Abstract

This research about the transformation of hijab women candidates in political stage direct election of regional head (Pilkada). In Indonesia hijab experienced a transformative instrument motif. This is related to the dynamics of democratization in Indonesia, the factor of political identity and religious polarization is very strong. The focus this study is the motive of wearing hijab on women's candidates influenced various aspects including religion, fashion trend, even political interests to gain power. Theoretical study use the rational action theory approach is the front stage and backstage. The object this research is women candidates who suddenly use hijab before the election of regional head. The purpose this study to determine the motives behind the use of hijab, the objective of political parties to bring women candidates berhijab to gain sympathy and captivate the voice of Muslim voters. The research method is textual analysis on the use of Hijab. The results is expected with the emergence of women candidates who have hijab in direct local elections (Pilkada) bringing blessings and benefits, not just playing masks on the political stage as a means of winning and power for personal and group interests.

Keywords: *hijab, female candidate, political stage, elections*

Abstrak

Penelitian ini tentang transformasi kandidat perempuan jilbab di panggung politik pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Di Indonesia hijab mengalami motif instrumen transformatif. Ini terkait dengan dinamika demokratisasi di Indonesia, faktor identitas politik dan polarisasi agama sangat kuat. Fokus penelitian ini adalah motif mengenakan jilbab pada kandidat perempuan dipengaruhi berbagai aspek termasuk agama, tren fashion, bahkan kepentingan politik untuk mendapatkan kekuasaan. Studi teoritis menggunakan pendekatan teori tindakan rasional adalah tahap depan dan belakang panggung. Objek penelitian ini adalah kandidat perempuan yang tiba-tiba menggunakan jilbab sebelum pemilihan kepala daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui motif di balik penggunaan jilbab, tujuan partai politik untuk mendatangkan kandidat perempuan berhijab untuk mendapatkan simpati dan memikat suara pemilih muslim. Metode penelitian adalah analisis tekstual tentang penggunaan Hijab. Hasilnya diharapkan dengan munculnya kandidat perempuan yang berjilbab dalam pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) membawa berkah dan manfaat, tidak hanya bermain topeng di panggung politik sebagai sarana menang dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Kata Kunci: *hijab, kandidat wanita, panggung politik, pemilu*

Latar Belakang

Perubahan terbesar di Indonesia terjadi saat runtuhnya orde baru berganti masa

reformasi. Perubahan dari sistem sentralistik ke desentralisasi, dari powerfull ke powerless, dari otoriter ke otonomi daerah. Pemilihan

kepala daerah langsung Inilah awal mula gerbang elit lokal dan politisi perempuan mengambil peran sebagai sebagai kandidat kepala daerah.

Sebagian besar penduduk di adalah muslim. Menggunakan hijab bagi perempuan muslimah adalah sebuah kewajiban bukanlah pilihan. Hijab adalah salah satu simbol ketaatan dan ketundukan pada Tuhan. Menggunakan hijab harus mengikuti aturan syariat Islam dan seyogyanya dilakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Tidak hanya mengikuti trend fashion kekinian apalagi bertujuan hanya sekedar kepentingan politik dan kekuasaan.

Dinamika politik dan demokratisasi di Indonesia terdapat Fenomena menarik dimana hijab mengalami instrument transformatif motif. Hal ini berkaitan dengan, faktor identitas politik dan polarisasi agama sangat kuat. Motif mengenakan hijab muslimah dipengaruhi berbagai aspek antara lain agama, model pakaian kekinian, dijadikan alat untuk kepentingan politik dan meraih kekuasaan.

Sejak tahun 2017 pesta politik di Indonesia serentak pemilihan kepala daerah (PILKADA) serentak seluruh Indonesia dipertontonkan banyaknya politisi perempuan mendadak mengenakan hijab. Panggung sandiwara dimainkan oleh mereka demi meraih suara pemilih karena mayoritas pemilih dari kalangan muslim. Mereka mendatangi Pondok Pesantren, masjid, rajin hadir ke pengajian, hadir di acara-acara peringatan hari besar Agama Islam dan sebagainya. Alhasil ada sebagian Kandidasi perempuan yang maju dalam Pemilihan kepala daerah mendadak berhijab.

Sebut saja Nurul Arifin merupakan pengurus DPP Partai Golkar maju sebagai calon Wali Kota Bandung. Puti Guntur Sukarno Putri kader PDIP sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Timur. Hana Hasanah Fadel kader PDIP Calon Gubernur Gorontalo. Emy Susanti kader partai Demokrat Calon

Bupati Sidoarjo. Tujuan Partai politik mengusung kandidat perempuan berhijab untuk meraih simpati dan memikat suara pemilih.

Besar harapan dengan munculnya kandidasi perempuan yang berhijab dalam kancah PILKADA membawa berkah dan manfaat, bukan sekedar memainkan topeng di panggung politik sebagai alat meraih kemenangan dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Penelitian ini fokus pada politisi perempuan yang menggunakan jilbab secara mendadak menjelang pemilihan kepala daerah langsung di empat tempat yaitu Jawa Timur, Kota Bandung, Kabupaten Sidoarjo, dan propinsi Gorontalo. Yang lebih unik ada dua kandidasi yang kalah dalam pertarungan kemudian membuka jilbabnya kembali. Seperti di emy susanty calon Bupati sidoarjo dan Hana Hasanah dari pemilihan Gubernur Gorontalo.

Identifikasi masalah pada penelitian ini untuk meneguhkan kembali penggunaan jilbab bagi para muslimah. Ada beberapa motif penggunaan jilbab antara lain: (1) Menggunakan jilbab adalah kewajiban bukan pilihan, (2) Penggunaannya mengikuti aturan normatif berdasarkan syariat Islam bukan hanya sekedar mengikuti tren fashion belaka, (3) Jilbab bukan hanya penutup aurat tetapi memiliki motif terhadap komoditisasi politik untuk meraih kekuasaan.

Berdasarkan identifikasi masalah maka penelitian ini menggunakan pendekatan teori tindakan rasional Max Weber, dimana masyarakat modern hanya dapat dipahami jika diketahui tindakan sosial untuk berinteraksi sosial. Setiap tindakan sosial mengandung motif sosial individu dalam bermasyarakat.

Sesuai dengan pembatasan masalah maka rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah motif sosial penggunaan jilbab bagi kandidasi perempuan yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah langsung, (2) Bagaimanakah Jilbab dijadikan komoditisasi

politik untuk meraih kemenangan dan kekuasaan.

Signifikansi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut: (1) Sebagai bahan acuan bagi seorang muslimah bahwa menggunakan jilbab merupakan kewajiban dalam menjalankan syariat Islam. (2) Diharapkan kepada politisi perempuan dan partai politik tidak memanfaatkan jilbab atau simbol-simbol keagamaan untuk meraih suara pemilih.

Kajian Teoritik untuk menganalisis penggunaan jilbab bagi kandidasi perempuan dalam panggung politik sebagai calon kepala daerah menggunakan teori rasionalisasi tindakan sosial Max Weber. Masyarakat modern hanya dapat dipahami jika diketahui tindakan sosial dalam berinteraksi sosial. Setiap tindakan sosial mengandung motif sosial individu dalam bermasyarakat.

Weber membedakan tindakan sosial menjadi empat jenis tindakan sosial berdasarkan metode interpretasi: (a) Tindakan rasional instrumentasi, (b) Tindakan rasional berorientasi Nilai, (c) Tindakan tradisional, (d) Tindakan Afektif. Dari keempat jenis tindakan sosial yang diutarakan Max weber, bahwa tindakan sosial apapun wujudnya dapat dimengerti menurut arti subyek dan pola-pola motif yang berkaitan dengan tindakan sosial.

Disamping itu rasionalitas menurut Max Weber dikelompokkan menjadi empat bentuk rasionalitas diantaranya; (a) Rasionalitas Praktis, (b) Rasionalitas Substantif, (c) Rasionalitas Formatif, (d) Rasionalitas teoritis. Tindakan manusia memang tidak bisa dikendalikan oleh apapun, tetapi tindakan tersebut memiliki tujuan sehingga bisa terkendali, karena hal yang terpenting dari sebuah tindakan adalah tindakan rasional.

Penelitian ini bertujuan mengetahui motif dibalik fenomena jilbab antara kesadaran normatif ataukah komoditisasi politik untuk

meraih kemenangan dan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau golongan.

Metode penelitian ini dilaksanakan pada kandidasi perempuan yang mengenakan jilbab di 4 tempat yaitu; kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, Propinsi Jawa Timur, Kota Bandung Jawa Barat dan Propinsi Gorontalo. Dengan waktu penelitian dari tanggal 2 Juli sampai dengan 9 September 2018.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif prespektif fenomenologi. Penelitian ini bermaksud mengetahui motif apakah yang digunakan oleh kandidasi perempuan yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah langsung di empat kabupaten/kota yakni; kabupaten Sidoarjo, propinsi Gorontalo, Kota Bandung dan Propinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hasil penelitian El Guindi tahun 2006 dengan judul “jilbab antara kesalehan, kesopanan dan perlawanan.¹ Merupakan kajian tentang makna penuh nuansa bahasa yang menyampaikan pesan sosial budayaa, selain simbol identitas dan perlawanan.

Penelitian oleh Atik catur Budiarti dalam jurnal Sosiologi Islam pada tahun 2011 dengan judul *Jilbab: Gaya Hidup Baru kaum Hawa*². Menurut Atik bahwa Jilbab merupakan tolak ukur tingkat religiusitas kaum hawa. Tetapi pada perkembangannya jilbab memiliki ideologi modernisasi tersembunyi, hijab sebagai tren fashion, sebagai implikasi konsumtif, dan menjelma menjadi simbol kelas sosial.

Ada perbedaan yang signifikan tentang hijab; antara kesadaran dan komoditisasi politik bagi kandidasi perempuan politik yang bertarung memperebutkan kursi kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah langsung (PILKADA) dimana ada sebagian politisi

¹ Fadwa El Guindi. 2003. “*Jilbab, antara Kesalehan, kesopanan dan perlawanan*” (Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta)

² Atik Catur budastuti. *Jilbab: Gaya Hidup Baru kaum Hawa. Jurnal Sosiologi Islam* Vol 1 No 1 April 2011, hlm i.

perempuan yang menggunakan jilbab secara mendadak menjelang pemilu.

Bahkan peneliti melihat ada berbagai motif tindakan rasional yang dilakukan politisi perempuan menggunakan jilbab sebagai simbol keagamaan yang dipakai untuk mendapatkan kemenangan dengan mengambil hati suara pemilih.

Pengertian jilbab ialah Pakaian penutup kepala perempuan di Indonesia semula lebih umum dikenal dengan kerudung, tetapi permulaan tahun 1980 lebih populer dengan jilbab. Jilbab berasal dari akar kata jalaba, berarti menghimpun dan membawa. Jilbab pada masa Nabi Muhammad SAW ialah pakaian luar yang menutupi segenap anggota badan dari kepala hingga kaki perempuan dewasa³.

Fungsi jilbab yang utama adalah menjadi tameng atau pelindung bagi kaum muslimah dari godaan kaum fasiq⁴ serta meninggikan derajat kehormatan kaum muslimah dari sesamanya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, fungsi hijab mengalami pergeseran, ketika aspek konsumerisme dan konsumtivisme berperan sebagai pendukung, jilbab tidak hanya sekedar

menjadi pelindung diri, tetapi menjadi trensetter fashion, beberapa perempuan tiba-tiba mengubah model berpakaian mereka menjadi sangat alim dan bersyariat.⁵

Jilbab dalam arti penutup kepala hanya dikenal di Indonesia. Di beberapa negara Islam, pakaian sejenis jilbab dikenal dengan beberapa istilah, seperti chador di Iran, pardeh di India dan Pakistan, milayat di Libya, abaya di Irak, charshaf di Turki, hijab di beberapa negara Arab-Afrika seperti di Mesir, Sudan, dan Yaman. Hanya saja pergeseran makna hijab dari semula berarti tabir, berubah makna menjadi pakaian penutup aurat perempuan semenjak abad ke-4 H.⁶

Jenis pakaian perempuan pada masa Nabi sebagaimana dapat ditelusuri di dalam syair-syair Jahiliyah, antara lain burqu', kain transparan atau perhiasan perak yang menutupi bagian muka kecuali dua bola mata; niqab, kain halus yang menutupi bagian hidung dan mulut; miqna'ah, kerudung mini yang menutupi kepala; qina', kerudung lebih lebar; litsam atau nishaf, kerudung lebih panjang atau selendang; khimar, istilah generik untuk semua pakaian penutup kepala dan leher; jilbab, pakaian luar seperti dijelaskan di atas.

Latar belakang jilbab Jilbab merupakan fenomena simbolik sarat makna. Jika yang dimaksud jilbab penutup kepala (veil) perempuan, maka jilbab sudah menjadi wacana dalam Code Bilalama (3.000 SM), kemudian berlanjut di dalam Code Hammurabi (2.000 SM) dan Code Assyria (1.500 SM)⁷. Ketentuan penggunaan jilbab sudah dikenal di beberapa Kota tua seperti Mesopotamia, Babilonia, dan Assyria. Perempuan terhormat harus

³ Nazaruddin Umar, 2014. K³, Fasiq adalah Secara etimologi kata fasiq berasal dari bahasa Arab yaitu fasaqa, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia ialah kata sifat yang berarti tidak mengindahkan perintah Tuhan (berkelakuan buruk, jahat, dan berdosa besar); orang yang percaya kepada Allah swt., tetapi tidak mengamalkan perintahnya, bahkan melakukan perbuatan dosa.

³Admin. 2011. Jilbab dalam Alquran dan jilbab zaman sekarang. Dalam <http://www.akhwatmuslimah.com>.

³ Syarief Husyein, 'Antropologi Jilboob: Politik Identitas, Life Style, Dan Syari'ah', *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 2015. Etika Fiqih Membela Perempuan. PT Alex Media Komputindo Jakarta. Hal: 42

⁴ Fasiq adalah Secara etimologi kata fasiq berasal dari bahasa Arab yaitu fasaqa, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia ialah kata sifat yang berarti tidak mengindahkan perintah Tuhan (berkelakuan buruk, jahat, dan berdosa besar); orang yang percaya kepada Allah swt., tetapi tidak mengamalkan perintahnya, bahkan melakukan perbuatan dosa.

⁵Admin. 2011. Jilbab dalam Alquran dan jilbab zaman sekarang. Dalam <http://www.akhwatmuslimah.com>.

⁶ Syarief Husyein, 'Antropologi Jilboob: Politik Identitas, Life Style, Dan Syari'ah', *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 2015.

⁷ Nazaruddin Umar, 2014. Ketika Fiqih Membela Perempuan. PT Alex Media Komputindo Jakarta. Hal: 42

menggunakan jilbab di ruang publik. Sebaliknya, budak perempuan dan prostitusi tidak boleh menggunakan. Perkembangan selanjutnya jilbab menjadi simbol kelas menengah atas masyarakat kawasan itu.

Ketika terjadi perang antara Romawi-Byzantium dan Persia, rute perdagangan antarpulau mengalami perubahan untuk menghindari akibat buruk wilayah peperangan. Kota di beberapa pesisir Jazirah Arab tiba-tiba menjadi penting sebagai wilayah transit perdagangan. Wilayah ini juga menjadi alternatif pengungsian dari daerah yang bertikai. Globalisasi peradaban secara besar-besaran terjadi pada masa ini. Kultur Hellenisme-Byzantium dan Mesopotamia-Sasania ikut menyentuh wilayah Arab yang tadinya merupakan geokultural tersendiri.

Menurut De Vaux dalam *Sure le Voile des Femmes dans 'Orient Ancient'*⁸, tradisi jilbab (veil) dan pemisahan perempuan (*seclusion of women*) bukan tradisi orisinal bangsa Arab, bahkan bukan juga tradisi Talmud dan Bibel. Tokoh-tokoh penting di dalam Bibel, seperti Rebekah yang mengenakan jilbab berasal dari etnis Mesopotamia di mana jilbab merupakan pakaian adat.

Jilbab yang semula tradisi Mesopotamia-Persia dan pemisahan laki-laki dan perempuan merupakan tradisi Hellenistik-Byzantium, menyebar menembus batas geokultural, tidak terkecuali bagian utara dan timur Jazirah Arab seperti Damaskus dan Baghdad yang pernah menjadi ibu kota politik Islam zaman Dinasti Mu'awiyah dan Abbasiah.

Institusionalisasi jilbab dan pemisahan perempuan mengkristal ketika dunia Islam bersentuhan dengan peradaban Hellenisme dan Persia di kedua Kota penting tersebut. Pada periode ini, jilbab yang tadinya merupakan pakaian pilihan (*occasional costume*)

⁸ Prof Muhammad Palangkaraya: <http://berita.sampit.co.id/2018/04/23/azan-dan-jilbab-prespektif-maqasid-as-syariah>.

mendapatkan kepastian hukum (*institutionalized*), pakaian wajib bagi perempuan Islam. Kedua Kota tersebut juga punya andil besar dalam kodifikasi kitab-kitab standar seperti hadis, tafsir, fikih, tarekh, termasuk pembakuan standar penulisan (*rasm*) dan bacaan (*qira'at*) Al Quran. Disadari atau tidak, unsur Hellenisme-Persia ikut berpengaruh di dalam kodifikasi dan standardisasi tersebut. Sebagai contoh, riwayat Israiliyat ikut mempertebal jilid kitab Tafsir al-Thabary yang kemudian menjadi rujukan ulama pada kitab-kitab tafsir sesudahnya⁹.

Wacana jilbab dalam Islam, ada dua istilah populer digunakan Al Quran untuk penutup kepala yaitu khumur dan jalabib, keduanya dalam bentuk jamak dan bersifat generik. Kata khumur (QS al-Nur/34:31) bentuk jamak dari khimar dan kata jalabib (QS al-Ahdzab/33:59) bentuk jamak kata jilbab. Al Quran dan hadis tidak pernah secara khusus menyinggung bentuk pakaian penutup muka. Bahkan, dalam hadis, muka dengan tegas masuk dalam pengecualian dan dalam suasana ihram tidak boleh ditutupi¹⁰.

Lagi pula, ayat-ayat yang berbicara tentang penutup kepala tidak ada satu pun disangkutpautkan dengan unsur mitologi dan strata sosial. Dua ayat di atas merupakan tanggapan terhadap kasus tertentu yang terjadi pada masa Nabi. Penerapan ayat seperti ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama Ushul Fikih; apakah yang dijadikan pegangan lafaznya yang bersifat umum, atau sebab turunnya yang bersifat khusus.

Dua ayat di atas turun dalam konteks keamanan dan kenyamanan perempuan. Bandingkan dengan chador yang dalam mitologi Sasania-Persia, dianggap pengganti

⁹ Prof Muhammad Palangkaraya: <http://berita.sampit.co.id/2018/04/23/azan-dan-jilbab-prespektif-maqasid-as-syariah>

¹⁰ Prof Muhammad Palangkaraya: <http://berita.sampit.co.id/2018/04/23/azan-dan-jilbab-prespektif-maqasid-as-syariah>

kemah menstruasi (menstrual hut), tempat pengasingan perempuan menstruasi di luar perkampungan. Sementara dalam tradisi Yunani, jilbab dianggap fenomena kelas masyarakat tertentu.

Ayat khimar turun untuk menanggapi model pakaian perempuan yang ketika itu menggunakan penutup kepala (*muqani'*), tetapi tidak menjangkau bagian dada, sehingga bagian dada dan leher tetap kelihatan. Menurut Muhammad Sa'id al-'Asymawi, QS al-Nur/24:31 turun untuk memberikan perbedaan antara perempuan mukmin dan perempuan selainnya, tidak dimaksudkan untuk menjadi format abadi.

Ayat jilbab juga turun berkenaan seorang perempuan terhormat yang bermaksud membuang hajat di belakang rumah di malam hari tanpa menggunakan jilbab, maka datanglah laki-laki iseng mengganggu karena dikira budak. Peristiwa ini menjadi sebab turunnya QS al-Ahdzab/33:33. Menurut Al-'Asymawi dan Muhammad Syahrur, terkait dengan alasan dan motivasi tertentu (*illat*); karenanya berlaku kaidah: Suatu hukum terkait dengan *illat*, di mana ada *illat* di situ ada hukum. Jika *illat* berubah, maka hukum pun berubah.

Ayat hijab, sangat terkait dengan keterbatasan tempat tinggal Nabi bersama beberapa istrinya dan semakin besarnya jumlah sahabat yang berkepentingan dengannya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (perlu diingat, ayat hijab ini turun setelah kejadian tuduhan palsu/hadis al-*ifk* terhadap 'Aisyah), Umar mengusulkan agar dibuat sekat (Arab: *hijab*) antara ruang tamu dan ruang privat Nabi. Tetapi, tidak lama kemudian turunlah ayat hijab.

Sedangkan, hadis yang berhubungan langsung dengan penggunaan jilbab hanya ditemukan dalam dua hadis ahad, hadis yang diriwayatkan perorangan, bukan secara kolektif dan *massif* (*masyhur* atau *mutawatir*). Hadis pertama bersumber dari Aisyah, Rasulullah

bersabda, "Tidak diperkenankan seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya jika sudah sampai usia balig menampakkan (anggota badannya) selain muka dan kedua tangannya sampai di sini," sambil menunjukkan setengah hasta.

Hadis kedua dari Daud yang diterima dari Aisyah, yang menceritakan ketika Asma binti Abi Bakr masuk ke rumah kediaman Rasulullah SAW, lalu Rasulullah mengatakan kepadanya, "Wahai Asma, sesungguhnya perempuan jika sampai usia balig, tidak boleh dipandang kecuali yang ini," sambil Rasulullah menunjukkan wajah dan telapak tangannya.

Menurut Asymawi, kedua hadis tersebut termasuk hadis ahad, bukan hadis mutawatir atau masyhur. Berdasar dengan hadis ahad memang kontroversial di kalangan ulama Ushul Fikih. Salah satu hadis tersebut di-mursal-kan (*jaringan penutur terputus*) oleh Abu Daud, karena bersumber dari Khalid ibn Darik yang bukan hanya tidak berjumpa (*mu'asharah*) tetapi juga tidak ketemu (*liqa'*) dengan Aisyah.¹¹

Di samping itu, hadis ini mulai populer pada abad ketiga tahun hijriah, dipopulerkan oleh Khalid ibn Darik, yang kemudian dimonumentalkan dalam Sunan Abu Daud. Kalau sekiranya hadis ini direpresentasikan pada umat Islam, maka sejak awal jilbab menjadi tradisi kolektif keseharian (*Sunnah mutawatirah bi al-f'il*), bukannya dengan kualifikasi hadis ahad-mursal. Tradisi jilbab di kalangan sahabat dan *tabi'in*, menurut Asymawi, lebih merupakan keharusan budaya daripada keharusan agama.

Muhammad Syahrur dalam bukunya *Al-Kitab wal Al-Qur'an* juga pernah menyatakan hijab hanya termasuk dalam urusan harga diri, bukan urusan halal atau haram. Pada awal abad ke-19 Qasim Amin dalam *Tahrir al-Mar'ah* sudah mempersoalkan

¹¹ Prof Muhammad Palangkaraya: <http://berita.sampit.co.id/2018/04/23/azan-dan-jilbab-prespektif-maqasid-as-syariah>

hal ini. Namun perlu ditegaskan, meskipun pemikir itu berpandangan kritis terhadap jilbab, tetapi mereka tetap mengidealkan penggunaan jilbab bagi perempuan.

Inti wacana mereka adalah bagaimana jilbab tidak membungkus kreativitas dan produktivitas perempuan, bukannya melarang atau menganjurkan pembukaan jilbab. Apakah fenomena ini sebatas tren yang punya jangka waktu tertentu, atau lahir dari sebuah kesadaran kolektif keagamaan. Murni hanya sebagai sebuah mode yang terselip unsur *privacy* di dalamnya, atau terselip unsur resistensi dan ideologi sebagai salah satu bentuk reaksi atau perlawanan terhadap kekuatan luar, seperti kecemasan dari dampak arus globalisasi, westernisasi, dan fenomena deislamisasi lain.

Apakah fenomena jilbab punya andil di dalam maraknya aspirasi peraturan daerah (*perda*) *syari'ah*, atau sebaliknya, *perda syari'ah* menjadi faktor merebaknya fenomena jilbab? Atau semacam gayung bersambut, tren jilbab sebagai mode, *privacy*, dan resistensi, mendapatkan legitimasi struktural.

Jika jilbab tampil bukan hanya sebagai mode dan *privacy*, tetapi tampil sebagai suatu kekuatan, pergerakan, pertahanan, dan proteksi, maka pada saat itu fenomena jilbab memiliki nuansa baru, bukan lagi hanya sebatas penutup aurat bagi perempuan tetapi memiliki kekuatan politik yang patut diperhitungkan.

Fenomena seperti ini memberikan harapan lebih positif bagi dunia perempuan atau sebaliknya, fenomena ini lebih merupakan bentuk lain dari politik patriarki yang menggunakan simbol-simbol agama di dalam melanggengkan status kuno: Kaum perempuan diserukan menggunakan jilbab dan kaum laki-laki diserukan memelihara kumis dan jenggot, dan dengan demikian segregasi laki-laki dan perempuan tetap akan langgeng.

Jilbab sebagai fenomenan resistensi

Ketika gerakan para mullah mulai marak di Iran pada tahun 1970 dan mencapai puncaknya ketika Imam Khomeini berhasil menggusur Reza Pahlevi yang dipopulerkan sebagai antek dunia Barat di Timur Tengah, maka Khomeini menjadi lambang kemenangan Islam terhadap boneka Barat. Simbol-simbol kekuatan Khomeini, seperti foto Imam Khomeini dan komunitas Black Veil menjadi tren di kalangan generasi muda Islam seluruh dunia. Semenjak itu jilbab mulai menghiasi kampus dunia Islam, tidak terkecuali Indonesia. Identitas jilbab seolah sebagai lambang kemenangan.

Perkembangan berikutnya, ketika perang dingin antara kekuatan Timur dan kekuatan Barat usai berbarengan dengan semakin pesatnya kekuatan pengaruh globalisasi, maka timbul kecemasan lebih kompleks dari kalangan umat Islam. Islam dan berbagai pranatanya berhadapan-hadapan langsung dengan dunia Barat. Huntington memberikan gambaran tentang benturan Barat dan Islam pasca benturan Timur-Barat, menunjukkan adanya tanda kebenaran, terutama setelah peristiwa 11 September 2001.

Sebagian umat Islam percaya bahwa untuk mengembalikan kekuatan Islam seperti zaman kejayaan dulu, umat Islam harus kembali kepada formalisme keagamaan dan sejarah masa lampau. Semangat mengembalikan simbol dan identitas Islam masa lalu terus dipompakan, termasuk di antaranya penggunaan jilbab bagi kaum perempuan dan pemeliharaan kumis dan jenggot bagi laki-laki.

Kadar proteksi dan ideologi di balik fenomena jilbab di Indonesia tidak terlalu menonjol. Fenomena yang lebih menonjol ialah jilbab sebagai tren, mode, dan *privacy* sebagai akumulasi pembengkakan kualitas pendidikan agama dan dakwah di dalam masyarakat. Lagi pula, bukankah salah satu ciri

budaya bangsa dalam potret perempuan masa lalu adalah kerudung.

Tidak perlu over estimate atau fobia bahwa fenomena jilbab merupakan bagian dari jaringan ideologi tertentu yang menakutkan. Jilbab tidak perlu dikesankan seperti "imigran gelap" yang selalu dimata-matai, seperti yang pernah terjadi pada masa lalu yaitu fenomena jilbab dicurigai sebagai bagian dari ekspor Revolusi Iran. Sepanjang fenomena jilbab tumbuh di atas kesadaran sebagai sebuah pilihan dan sebagai ekspresi pencarian jati diri seorang perempuan muslimah, tidak ada unsur paksaan dan tekanan, itu sah-sah saja. Tidakkah manusiawi jika seseorang menentukan pilihannya secara sadar.

Dinamika Politisasi Hijab Di Era Demokratisasi Politik Lokal

Motif sosial penggunaan jilbab bagi kandidasi perempuan yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah langsung. Ditahun politik ini dan menjelang pemilihan kepala daerah (PILKADA) serentak seluruh Indonesia dipertontonkan banyaknya politisi perempuan mengenakan hijab demi meraih suara pemilih karena mayoritas pemilih dari kalangan Muslim. Mereka mendatangi Pondok Pesantren, masjid, rajin hadir ke pengajian. Kandidasi perempuan yang maju banyak yang mendadak berhijab.

Penulis merangkum hanya sebagian kecil saja yakni perempuan yang mendadak berhijab menjelang PILKADA, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel.1.

KANDIDASI PEREMPUAN MENDADAK BERHIJAB MENJELANG PILKADA

Kab /Kota	Provinsi	Nama	Jabatan	Partai Pendukung	Pelaksanaan	Keterangan
Bandung		Nurul Arifin	Calon Wali Kota	Golkar, Demokrat, PKB dan PAN	2018	Artis & Politisi Partai Golkar
	Jawa Timur	Puti Guruh Sukarno Putri	Calon Wakil Gubernur	PDIP, PKB, PKS, dan Gerindra	2018	Dinasti Politik dari Trah Sukarno
Sido		Emy	Calon	PAN &	2010	Dinasti

arjo		Susanti	Bupati	Partai Non Parlemen		Politik Tumbang
	Gorontalo	Hana Hasana h Fadel	Calon Gubernur	PDIP	2017	Dinasti Politik Kalah

Sumber: data diolah peneliti, Juni 2018

Skema diatas menunjukkan bahwa ada empat kandidat politisi perempuan yang mendadak mempergunakan hijab untuk bertarung diajang pemilihan kepala daerah baik ditingkat Provinsi, tingkat Kota/ kabupaten. Sebut saja Nurul Ariifin pengurus DPP Partai Golkar sebagai calon Wali Kota Bandung. Puti Guntur Sukarno Putri kader PDIP sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Timur. Hana Hasanah Fadel kader PDIP Calon Gubernur Gorontalo. Emy Susanti kader partai Demokrat Calon Bupati Sidoarjo. Tujuan Partai politik mengusung kandidat perempuan berhijab untuk meraih simpati dan memikat suara pemilih.

Komoditisasi Hijab Pada Pemilihan Wali Kota Bandung 2018

Masuknya Nurul Arifin ke politik didasari oleh pemikirannya bahwa belum banyak perempuan yang terwakili di parlemen. Kepentingan perempuan kurang terwadahi dalam kebijakan atau keputusan parlemen.¹² Penghargaan yang diterima Nurul pada 2003 sebagai salah satu perempuan berkualitas untuk kandidat anggota legislatif versi LSM Cetro, membuat ibu dua anak itu banyak mendapat tawaran masuk partai politik, dan memilih bergabung dengan Partai Golkar.

Terjun ke bidang politik, Nurul pun meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dengan menempuh pendidikan ilmu politik di Universitas Indonesia pada 2004. Setelah menyelesaikan program S2, Nurul menjadi dosen ilmu politik di Universitas Nasional Jakarta.

¹² Fitrah Ardiansyah - Periset PR Bandung Raya. 11 Januari 2018-21.56

Selang setahun setelah bergabung dengan Golkar, Nurul terpilih menjadi anggota DPR RI dan duduk di Komisi II. Nurul bertugas di parlemen selama dua periode yakni 2004-2009 dan 2009-2014.

Gagal terpilih untuk ketiga kalinya sebagai wakil rakyat, tak membuat karier politik Nurul meredup. Di Partai Golkar, menduduki jabatan strategis sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar. Tahun 2018, Nurul Arifin bahkan diusung partainya untuk maju di Pilwalkot Bandung bersama kader Partai Demokrat, Chairul Yaqin Hidayat.¹³

Di waktu senggangnya, Nurul Arifin senang menonton film, membaca, dan travelling. Penyuka seafood itu juga suka mengisi waktunya dengan menulis. Nurul Arifin sebagai salah satu kandidat bakal calon Wali Kota Bandung dinilai peluangnya sulit bersaing dengan yang lain. Meski dianggap populer, hal itu tidak berpengaruh bagi warga berkaitan Pemilihan Wali Kota Bandung 2018.

Poros Golkar-Demokrat yang mengusung Teh Nurul (Nurul Arifin) dan Kang Rully (Chairul Yaqin Hidayat), terlihat agak berat karena berkompetisi dengan calon pertahana. Dalam Pemilihan Wali Kota Bandung ada tiga kandidat yang memposisikan diri sebagai kandidat, maka sosok Nurul masih kalah dari Oded M Danial dan Yossi Irianto. Masalahnya masyarakat melihat kedekatan Oded dengan Kang Emil (Ridwan Kamil).

Kedua, Nurul orang pusat yang diturunkan ke Bandung. Dalam Pilkada terkadang orang lebih melihat kedekatan figur dengan publik. Sehingga kandidat yang sudah memiliki rekam jejak dan pernah bekerja di Kota Bandung sangat diunggulkan seperti Oded yang merupakan wakil wali Kota dan Yossi sebagai sekda. Sebagai artis, Nurul bisa

saja tidak unggul pada tingkat pemilihan atau elektabilitas namun menonjol pada popularitas.

Tapi di sisi lain sosok Oded sebagai wakil Emil juga mempunyai popularitas cukup baik. Kalau kita *flashbak* ke Pemilihan wali Kota Bandung 2013 kenapa Kang Emil terpilih, salah satu tipologi pemilih di Kota Bandung adalah pemilih rasional. Pemilih rasional itu sering kali tidak mempertimbangkan soal popularitas tapi lebih pada kompetensi dan *track record*. Itulah yang sudah dimiliki calon pertahana Mang Oded dan Pak Yossi.

Meski Nurul saat ini lebih banyak di dunia politik, masih cukup sulit bersaing dengan Oded dan Yossi. Sebab sejauh ini pemilih belum melihat Nurul melakukan sesuatu untuk Kota Bandung. Itulah problem Nurul Arifin dalam menghadapi pemilih rasional. Saya lihat pemilih Kota Bandung lebih pada rasional daripada tradisional. Sehingga popularitas itu tidak jadi yang sangat penting.

Komoditisasi Hijab Pada Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur 2018

Adalah seorang Puti Guruh Sukarno Putri; cucu dari bapak Proklamator Republik Indonesia yaitu bapak Presiden RI yang pertama Soekarno, merupakan Calon Wakil Gubernur Jawa Timur 2018 Terjun ke dunia politik tentu bukan menjadi keputusan yang mudah. Ranah tersebut menuntut seseorang memiliki wawasan luas dan kemampuan memadai karena punya kaitan dan peran langsung dengan masyarakat. Tapi hal tersebut tak menyurutkan tekad Puti Pramathana Puspa Seruni Paundrianagari Guntur Soekarno untuk mengikuti jejak sang kakek, Soekarno, masuk ke dunia politik. Politik sendiri bukan hal yang baru bagi putri tunggal dari Guntur Soekarno Putra tersebut.

Sebenarnya mereka memang besar dan tumbuh dari keluarga yang berlatar belakang

¹³www.pikiranrakyat.com/tags/pilwalkot.Bandung/2018

politik, mulai kecil mereka memang sudah tidak asing lagi dengan pembicaraan yang berbau politik. Artinya politik tidak melulu bicara soal kekuasaan dan lain sebagainya, tetapi pembicaraan tentang bagaimana mencintai tanah air, budaya itu sudah menjadi bagian dari diskusi-diskus politik kecil.¹⁴ Ayahnya Guruh Sukarno Putra sendiri yang menjadi teman diskusi politik Puti sejak kecil. Mulai dari permasalahan harga pangan naik hingga masukan untuk membaca buku-buku tulisan Bung Karno, mulai dari yang tingkat humanis, penyambung lidah rakyat dan masih banyak lagi.

Punya latar belakang yang seperti itu, nggak heran jika perempuan yang akrab disapa Mbak Puti ini mengantongi modal berharga buat jadi sosok pemimpin yang dicintai rakyat. Perempuan kelahiran 26 Juni 1971 itu ternyata memiliki beragam pengalaman yang nggak bisa diremehkan, Ladies. Di antaranya menjadi anggota DPR 2009–2014 dan 2014–2019 serta menjabat sebagai Wakil Ketua Yayasan Fatmawati dan Ketua Yayasan Wildan. Latar belakang pendidikannya pun cukup mentereng, Ladies. Wanita 46 tahun itu dulu menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Berbekal beberapa catatan tersebut, Puti lantas mantap memilih terjun ke politik.

Makin membanggakan karena beliau pun memperoleh dukungan dari keluarga, termasuk mantan presiden RI, Megawati Soekarnoputri. Sepertinya impian besar Puti untuk memberikan pengabdian terbaik bagi nusa dan bangsa bakal segera terlaksana. Pasalnya, beliau mendapat mandat langsung dari Ibu Megawati untuk jadi cawagub pendamping Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Pilgub Jatim 2018.

Bergesernya era orde baru sentralistik menjadi desentralisasi otonomi daerah.

¹⁴ Lihat Hasil Wawancara Reporter Merdeka.com dengan Puti Guruh Sukarno februari 2018, diunduh peneliti pada 19 Juni 2018

Ditandai tumbangnya presiden Soeharto, demokrasi dan otonomi daerah tumbuh. Namun seiring itu pula politik dinasti pun tumbuh pesat sebagai parasit di dalamnya. Apalagi setelah era pemilihan kepala daerah langsung. Terdapat keluarga yang anggotanya menggunakan kekuatan politik formal selama lebih dari satu generasi.

Formasi politik dinasti sebagai "keluarga yang berhasil bertahan dalam dua siklus pemilihan eksekutif" dengan banyak "mencoba memperluas basis mereka untuk memasukkan pos legislatif di berbagai tingkat pemerintahan", untuk menambah jabatan eksekutif pemerintah yang mereka dominasi.¹⁵

Kandidat dengan sokongan politik dinasti punya kekuatan karena pemimpin daerah punya akses terhadap penguasaan sumber daya. Gejala ini juga didukung lemahnya sistem *checks and balances* dalam pemerintahan. Tak jarang terjadi praktik korupsi pada politik dinasti. Contohnya adalah yang terjadi pada (keluarga) Atut Chosiyah di Banten. Pada konteks yang lebih luas, kecenderungan dinasti politik tidak hanya muncul dalam pilkada. Organisasi kepartaian di Indonesia tidak bebas dari isu kekuasaan kekerabatan.

Marcus Mietzner dalam temuan penelitiannya, *The Sukarno Dynasty in Indonesia* memberi contoh bagaimana persona dan kharisma Sukarno menjadi figur politik yang sentral, baik untuk membangun ataupun melakukan regenerasi. Pada satu sisi, kekuatan imaji atas figur tersebut membantu kekuatan politik partai terutama dalam mengumpulkan suara elektoral. Di sisi lain, melalui persona dan kharisma, organisasi partai politik memiliki potensi krisis dalam melakukan regenerasi kepemimpinan¹⁶.

¹⁵ Buehler dalam Edward Aspinall dan Muhammad Uhaib As'ad, (2013) <http://journal.sagepub.com/doi/abs/101177>

¹⁶ Marcus Mietzner .The Sukarno Dynasty in Indonesia; Between Institutionalisation, ideological continuity and crisis of succession. Journal *South East*

Kekuasaan juga terjadi dalam keluarga Prabowo Subianto Djojohadikusumo, menunjukkan bagaimana sosok keluarga tersebut berpengaruh kuat dalam membangun basis organisasi partai politik. Secara lebih luas, kita juga bisa merujuk paparan James C. Scott¹⁷ mengenai, *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia*, ihwal bagaimana ikatan patron-klien ala dinasti politik lokal tumbuh subur di Asia Tenggara. Tidak saja menjadi satu karakter kultural, model ikatan sosial itu mencoba bertransformasi dan mempertahankan diri mengikuti perubahan sosial.¹⁸

Termasuk dalam mekanisme baru, yakni politik elektoral atau pilkada. Masalah politik dinasti dalam pilkada ini juga sempat dibatasi Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang menyebutkan bahwa calon "tidak memiliki konflik kepentingan", antara lain tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana (ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu). Sayangnya pasal tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak konstitusional.

Komoditisasi Hijab Pada Pemilihan Bupati Sidoarjo 2010

Emy Susanti adalah seorang profesor ahli Sosiologi Gender dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bergelar guru besar, Emy Susanti tetaplah istri dan ibu. Kiprahnya dalam pendidikan tak terlepas dari dukungan keluarga. Istri Win Hendrarso, mantan bupati Sidoarjo, itu mengaku mendapat banyak

dukungan dari suami. *Tentang Prof. Dr. Dra. Emy Susanti, MA*¹⁹

Ternyata, dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk yang unik. Yakni, tidak mencampuri urusan masing-masing. Hal itu menjadi komitmen, Emy dan suami untuk mendukung karir masing-masing. Emy dan suami memegang teguh profesionalisme. Apalagi, sebagai akademisi, Emy sering menyoroti kebijakan pemerintah. Kebetulan, suaminya berkarir sebagai Bupati Sidoarjo dua periode sejak 1999 – 2005, periode yang kedua 2005 – 2010.

Memang, Emy bertekad agar buah pemikirannya dapat menjadi masukan bagi pemerintah. Keberadaan sang suami tak lantas menghambat gerakannya. Apalagi, Win tak serta-merta melarang Emy mengkritisi regulasi pemerintah. Emy pun menceritakan pengalamannya berdemo pada 1998. Kala itu, dia terjun bersama para mahasiswa untuk mengkritisi pemerintah. Menariknya, ada sang suami yang menjabat kepala biro pemerintahan di Pemprov Jatim. Mereka memahami posisi masing-masing.

Emy mengaku senang atas pembagian peran yang sepadan serta relasi yang demikian apik dalam keluarganya. Belum lagi, demi penelitiannya, Emy kerap harus bepergian. Hal itu mendapat lampu hijau dari suami dan anaknya, Praditya Ardinugroho. Emy menerangkan, seluruh anggota keluarganya terbiasa bertanggung jawab dengan pilihan karir masing-masing. Anak nya justru memilih jadi pengusaha, tidak mengikuti jejak sebagai akademisi ataupun ayahnya.

Akrobat politik dilakukan Emy susanti yang akademisi dosen di Universitas Airlangga Surabaya menjadi politisi yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah. Pada awal tahun 2010 Emy Susanti Hendrarso, pernah maju sebagai calon wali kota Surabaya tetapi gagal karena tidak satu partai yang

Asia Research. SOAS University of London. First Published July 20 2016

¹⁷ James Scott (2014)

¹⁸ Purdey, J. (2016). Narratives to power: The case of the Djojohadikusumo family dynasty over four generations. *South East Asia Research*, 24(3), 369-385.

¹⁹ Jawa Pos.com diunduh 18 Juni 2018

mendukungnya, sampai akhirnya banting stir maju sebagai calon Bupati Sidoarjo menggantikan posisi suaminya Win Hendarso yang menjabat Bupati Sejak 1999 sampai dengan 2010.

Meski belum mengatakan sendiri bakal maju sebagai Calon bupati Sidoarjo. Namun, melalui elemen masyarakat yang mengatasnamakan Suara Masyarakat Sidoarjo (SMS), istri Bupati Sidoarjo Win Hendrarso ini sudah menyatakan siap maju sebagai calon bupati.

SMS merupakan salah satu elemen pendukung Emy Hendrarso. Mereka menilai Emy cukup pantas menjadi bupati di era mendatang melanjutkan kinerja Bupati Win Hendrarso.

Sejak menyatakan siap maju menjadi calon Bupati Sidoarjo 2010-2015 menggantikan suaminya, Emy Susanti merubah penampilan dengan memakai Hijab meski hanya kain pashmina penutup kepala. Sering menghadiri acara publik memanfaatkan fasilitas karena pada saat itu emy adalah ketua PKK kabupaten Sidoarjo. Sering tampil diacara keagamaan, mendekati organisasi Nahdatul Ulama (NU) karena mayoritas warga Sidoarjo adalah NU. Dengan mengenakan baju muslimah dan berhijab secara mendadak.

Pilkada Sidoarjo tahun 2010 diselenggarakan pada tanggal 25 Juli 2010 diikuti oleh lima pasangan calon Kepala Daerah dan Wakilnya Kabupaten Sidoarjo periode 2010-2015, yakni Yuniawati-Sarto, Emy Susanti – Khulaim Junaidi, Agung Subaly- Samsul Wahid, Saiful Ilah – Hadi Sutjipto, dan Bambang Prasetyo Widodo – Khoirul Huda.

Jumlah pemilih pada pilkada Sidoarjo tahun 2010 meningkat, dari 1.133.828 menjadi 1.286.640 dengan perolehan suara sah sebanyak 132.977. Calon pasangan Yuniawati – Sarto mendapat 54.593 (7,32%), Emy Susanti – Khulaim Junaidi dengan perolehan suara 82.918 suara (11,12%), Agung Subaly –

Samsul Wahid mendapat 24.247 suara (3,25%), Saiful Ilah – Hadi Sutjipto memperoleh 450.586 suara (60,45%), dan Bambang Prasetyo Widodo – Khoirul Huda mendapat suara 132.977 (17,84%).

Jika diurutkan berdasarkan jumlah perolehan suara maka pasangan Saiful Ilah – Hadi Sutjipto unggul dengan perolehan suara 450.586 suara (60,45%), disusul kemudian pasangan Bambang Prasetyo Widodo-Khoirul Huda dengan perolehan suara 132.977 (17,84%), menyusul dibawahnya pasangan Emi Susanti-Khulaim Junaedi dengan perolehan suara 82.918 (11,12%), diikuti oleh pasangan Yuni-Sarto dengan perolehan suara 54.593 (7,32%) menempati posisi keempat, dan yang terendah yakni pasangan Agung Subali- Samsul Wahid dengan mendapat 24.247 suara (3,25%). Pada pilkada Sidoarjo tahun 2010 ini dimenangkan oleh pasangan Saiful Ilah- Hadi Sutjipto.

Dari hasil Pilkada Sidoarjo ada tiga hal mendasar yang patut menjadi pelajaran. Yang pertama bahwa politik dinasti bukanlah kekuatan mutlak untuk meraih kekuasaan. Yang kedua Pendidikan dan profesionalisme calon Bupati Emy Susanti tidak menjadi tolak ukur bagi pemilih, yang ketiga penggunaan Hijab hanya dipakai sebagai simbol panggung depan (front stage) untuk meraih simpati suara pemilih kaum muslimin dan muslimat.

Akhirnya setelah meraih suara ketiga dari lima calon Bupati Sidoarjo, Emy Susanti kembali ke gaya fashion yang awal sebelum mendeklarasikan sebagai calon Bupati, tanpa memakai pakaian muslimah, membuka dan menanggalkan hijab yang dipakainya saat-saat mendekati konstituen, berkampanya diruang publik.

Disini terbukti bahwa Emy sekalipun dia berpendidikan tinggi strata tiga (S3) tidak mendapatkan simpati dari masyarakat. Motif penggunaan hijab adalah memanfaatkan simbol Agama untuk kepetingan politik dan kekuasaan.

Komoditisasi Hijab: Pemilhan Calon Gubenur Gorontalo 2017

Hana Hasanah Fadel Muhamma
Profesi: Politisi beragama: Islam, Tempat Lahir: Jakarta Senin, 1 September 1969. Jabatan Karirnya antara lain, Anggota DPD RI dapil Gorontalo 2014-2019, Penggerak PKK Provinsi Gorontalo periode tahun 2001 – 2009, Dharma Wanita Provinsi Gorontalo periode tahun 2001 – 2009, Kaukus Perempuan Parlemen DPD RI, SIKIB (Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu), DPP HWK (Himpunan Wanita Karya).

Hana Hasanah Shahab atau Hana Hasanah Fadel Muhammad adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Gorontalo. Hana merupakan isteri dari Fadel Muhammad yang merupakan Gubernur Provinsi Gorontalo periode tahun 2001 – 2006 dan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Hana adalah istri kedua Fadel. Setelah bercerai dari istri pertamanya, Fadel menikahi wanita berdarah campuran Arab ini. Begitu juga Hana, pernikahan dengan Fadel adalah pernikahan kedua. Dari suami pertamanya, dia punya seorang putri bernama Tania.

Wanita ini juga sempat menghiasi layar infotainment tahun 2011, karena melarang Tania dinikahi aktor Tommy Kurniawan. Alasan Hana saat itu Tania masih terlalu muda. Akhirnya gonjang ganjing kasus ini selesai tahun 2014. Hana Hasanah aktif dalam berbagai kegiatan organisasi seperti: Penggerak PKK Provinsi Gorontalo periode tahun 2001 – 2009, Dharma Wanita Provinsi Gorontalo periode tahun 2001 – 2009, Kaukus Perempuan Parlemen DPD RI, SIKIB (Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu), serta DPP HWK (Himpunan Wanita Karya).

Pada pilkada serentak 2017 untuk Pemilihan Gubernur Gorontalo, PDIP mengusung Hana Hasanah Fadel Muhammad

sebagai calon gubernur Gorontalo. Hana maju dengan jargon Mengembalikan Kejayaan Provinsi Gorontalo. Program andalannya mengembangkan potensi SDM. Selain itu meningkatkan potensi perikanan, peternakan, pertanian dan pariwisata. Dia juga berjanji meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan di Gorontalo.

PDIP mengumumkan calon kepala daerah yang bakal diusungnya di pilkada serentak 2017. Selain mengumumkan calon gubernur DKI, PDIP juga mengumumkan calon kepala daerah di daerah lain. Untuk Pemilihan Gubernur Gorontalo, PDIP mengusung Hana Hasanah Fadel Muhammad. Istri dari Fadel Muhammad itu hadir langsung dalam pengumuman di kantor DPP PDIP, Jakarta. Kehadiran Hana menarik perhatian karena dia satu-satunya calon gubernur wanita PDIP yang hadir saat itu.

Hana Fadel Muhammad kelahiran 1 September 1969 ini masih menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Gorontalo. Kini Hana berniat meneruskan langkah suaminya yang menjadi gubernur Gorontalo dari tahun 2001 sampai 2009. Tahun 2006, Fadel Muhammad memenangkan Pilgub Gorontalo dengan perolehan suara 82 persen. Angka yang sangat besar sepanjang sejarah pemilihan langsung di Indonesia. Fadel meninggalkan Gorontalo karena menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Namun terkena reshuffle dan digantikan Sharif Cicip Sutardjo. Hana adalah istri kedua Fadel. Setelah bercerai dari istri pertamanya, Fadel menikahi wanita berdarah campuran Arab ini. Begitu juga Hana, pernikahan dengan Fadel adalah pernikahan kedua. Dari suami pertamanya, dia punya seorang putri bernama Tania. Wanita ini juga sempat menghiasi layar infotainment tahun 2011, karena melarang Tania dinikahi aktor Tommy Kurniawan. Alasan Hana saat itu

Tania masih terlalu muda. Akhirnya gonjang-ganjing kasus ini selesai tahun 2014.

Hana maju dengan jargon Mengembalikan Kejayaan Provinsi Gorontalo. Program andalannya mengembangkan potensi SDM. Selain itu meningkatkan potensi perikanan, peternakan, pertanian dan pariwisata. Dia juga berjanji meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan di Gorontalo.

Akhirnya perhelatan akbarpun selesai, ternyata politik dinasti tidak mampu mengantarkan hana hasanah sebagai pemenang menjadi gubernur gorontalo menggantikan kejayaan dan kesuksesan suaminya dulu Fadel Muhammad yang berkuasa sejak tahun 2001 sampai dengan 2009. Bahkan yang lebih ironis, dia menanggalkan hijab yang dulunya dipakai saat menjelang pemilihan kepala daerah, dipakai saat kampanye mendekati pemilih dan partisipan di provinsi Gorontalo.

Ini adalah fenomena dan fakta bahwa motif penggunaan hijab demi kepentingan komoditi politik dan kekuasaan bukan dari kesadaran normatif syari'at Agama Islam bahwa menggunakan hijab adalah bagian dari kewajiban bukanlah pilihan.

Kesimpulan

Penggunaan Hijab bagi politisi perempuan fenomena yang baru menjelang pemilihan kepala daerah langsung. Majelis Ulama di Indonesia melarang keras penggunaan hijab untuk kepentingan komoditi politik atau politisasi agama yang dilakukan hanya untuk kepentingan sesaat. Salah satu modus yang menjadi sorotan adalah penggunaan atribut keagamaan seperti penggunaan hijab jelang pilkada maupun pilpres. Sebaiknya politisi tidak melakukan interaksi simbolik agama, misalnya, pada jelang pilkada ataupun pilpres ramai-ramai pakai jilbab, sekadar kepentingan sesaat, mengelabui umat mengatasnamakan agama.

Itulah yang namanya politisasi agama, salah satunya. Atau ramai pakai *uniform* keagamaan hanya sekadar mencari simpati komunitas agama, hanya untuk kepentingan politik sesaat. Kewajiban umat Islam bertanggung jawab dan merawat negara; Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanggung jawab umat Islam untuk berpartisipasi dalam bernegara, pemilu. Umat Islam mempunyai hak memilih pemimpin yang jujur, yang berkompoten dan amanah karena itu bagian dari agama. Masalah politik dalam koridor keagamaan adalah mutlak, Karena Islam tidak memisahkan politik keumatan. Fenomena ini yang banyak muncul menjelang pilkada.

Agama harus menjadi kaidah penuntun di dalam kehidupan politik kenegaraan, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan politik. Akan tetapi, kalau mengatasnamakan agama untuk kepentingan politik praktis tentu ini harus dikoreksi. Agama tidak boleh dijadikan sekadar justifikasi untuk meraih tujuan politik sesaat.

Kampanye di area keagamaan seperti di Pondok pesantren, dalam masjid, lembaga keagamaan. Pesantren, Masjid adalah pranata keagamaan dan agama Islam tidak melarang untuk bicara politik. Bukan sekadar tidak melarang, tapi Islam memiliki aturan soal masalah politik, memilih pemimpin itu bagian dari instrumen politik dan Islam mengatur. Kalau di Masjid membahas memilih pemimpin yang baik, itu bukan hanya dianjurkan tapi itu bagian dari ajaran agama.

Akan tetapi tidak pada politik praktis. Ada aturan kenegaraan, ada aturan yang harus dijaga. Kampanye tidak boleh di tempat-tempat tertentu salah satunya di tempat ibadah, seperti masjid, Pondok Pesantren, lembaga-lembaga pendidikan agama Islam.

Temuan-Temuan Penelitian adalah; Dinasti politik bukanlah jaminan mutlak terhadap kemenangan calon kepala daerah;

Motif pemakaian hijab, simbol agama yang dipakai untuk kepentingan politik dan kekuasaan; Pendidikan, profesionalisme, popularitas tidak berbanding lurus dengan keterpilihan dan kemenangan calon kepala daerah; Membuka dan menanggalkan hijab, setelah gagal bertarung di arena pilkada; Keempat kandidat perempuan tersebut mengalami kekalahan meski didukung oleh politik dinasti; Menguatnya politik identitas dan polarisasi agama untuk mencari simpati pemilih; dan Faktor-faktor penguat terhadap politik identitas yakni; genealogy, Religious, Culture dan Interest.

Metafora Coin Hubungan Masjid dan Politik
<https://beritasampit.co.id/2018/04/24/metafora-coin-hubungan-masjid-dan-politik/>

Umar, Nazarudin. 2014. *Ketika Fiqih Membela Perempuan*. PT Alex Media Komputindo Jakarta

Muhith, Nur Faizin. 2002. Definisi Jilbab Dalam Alqur'an dan Jilbab Zaman Sekarang. Dalam <http://www.indojilbab.com>

Daftar Pustaka

- Bennett, Linda Rae, 2005. *Women, Islam, and modernity*. New York: Hill and Wang
- Davis, Fred. 1992. *Fashion, Culture, and Identity*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Freideman, Jonathon. 1992. "Narcissism, Roots and Postmodernity: The Constitution of Selfhood in the global Crisis", *Modernity and Identity*, Scott lash & Jonathan freidman (Eds). Oxford: Blackwell.
- Lukenns-Bull, Ronald. 2005. *A Peaceful Jihad: Negotiating Tradition, Modernity, and Identity*. New York. Palgrave Macmillan.
- Purdey, J. (2016). Narratives to power: The case of the Djojohadikusumo family dynasty over four generations. *South East Asia Research*, 24(3), 369-385.
- Qodir. Zully. 2011. Public Sprere Contestation: Configuration of Political Islam in Contemporary Indonesia. *Indonesia Journal of Islam and Muslim Societies*. Vol. I No. 1, 123-149.
- Storey, Jhon. 1996. *Cultural Studies & Study of Popular Culture; Teorie and Methods*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Azan dan Jilbab, Prespektif Maqasid as Syariah
<https://beritasampit.co.id/2018/04/23/azan-dan-jilbab-prespektif-maqasid-as-syariah>.